

PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN KUNCI MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Siti Nurhalizah ¹⁾, Junaidi ²⁾, Winda Syapira ³⁾, Desprians Ramadnan ⁴⁾, Imam Rivai ⁵⁾
Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia ^{1,2,3,4,5)}

Corresponding Author:

sitinurhalizah@gmail.com ¹⁾

History:

Received: 25 Februari 2023
Revised : 10 Maret 2023
Accepted: 23 April 2023
Published: 25 Januari 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Sektor perikanan di berbagai daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan wilayah, yang dapat meningkatkan pemerataan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Perikanan adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat kompleks, sehingga tantangan dalam menjaga sumber daya tersebut juga menjadi isu yang cukup rumit dalam pembangunan perikanan, terutama untuk lobster, kepiting, dan rajungan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, hal ini bukan hanya merupakan kebanggaan, tetapi juga harus disikapi dengan tindakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam upaya melindungi sumber daya perikanan khususnya lobster, kepiting, dan rajungan untuk kelestariannya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain segera menerbitkan aturan pelaksana atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015, serta memaksimalkan sosialisasi dari instansi terkait mengenai peraturan tersebut agar tidak ada lagi praktik penangkapan liar terhadap lobster, kepiting, dan rajungan.

Kata kunci: Pembangunan berkelanjutan, sumber daya perikanan, ZEE

Abstract

The fisheries sector in various regions has strategic significance for regional development, regional development can enable increased equality towards the creation of a just and prosperous society. Fisheries are a very complex economic activity so the challenge of maintaining these resources is a quite complex issue in the development of fisheries, especially lobsters, crabs and crabs. For Indonesia as an archipelagic country, events like this are steps that are not only something to be proud of, but need to be responded to with actions that support the welfare of the people. Based on the research results, it is known that in an effort to protect fishery resources specifically lobster, crab and crab in the context of preserving them, there are several efforts that can be made, namely by immediately issuing implementing regulations for the issuance of Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Number 1/MEN-KP/2015, maximizing socialization from the relevant agencies Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 1/MEN-KP/2015 so that the practice of catching lobsters, crabs and crabs in the wild will no longer occur.

Keywords: Sustainable development, fisheries resources, EEZ

PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan adalah sumber daya yang terbatas tetapi dapat pulih kembali, artinya setiap pengurangan akibat kematian atau penangkapan dapat dipulihkan hingga mencapai tingkat produktivitas semula. Sumber daya perikanan laut mencakup ikan pelagis dan ikan demersal. Ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai potensi perikanan.

Wilayah pengelolaan perikanan laut di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena berbatasan langsung dengan laut lepas. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan dari perairan Indonesia meliputi ikan, kerang, tenggiri, kepiting, rajungan, dan udang.

Penangkapan sumber daya ikan di perairan Indonesia yang masih bersifat open access (terbuka bagi semua nelayan) dikhawatirkan dapat menyebabkan overfishing. Hal ini tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan potensi dan hasil tangkapan

sumber daya ikan di perairan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia, menghitung batas potensi lestari maksimum (Cmsy) dan batas upaya optimum (Fopt) sumber daya ikan di perairan Kabupaten Bangka Selatan, serta mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah para nelayan Indonesia melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memahami rancangan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan?
- 2) Untuk memahami cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi perikanan berkelanjutan?
- 3) Untuk memahami metode yang digunakan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti, dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran literatur dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan perikanan, termasuk hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang mendukung tujuan penulisan ini. Tinjauan literatur dilakukan dengan memeriksa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, surat kabar, situs web, serta dokumen lain yang relevan dengan masalah tersebut.

Data yang telah dikumpulkan melalui serangkaian teknik pengumpulan tersebut di atas dianalisis secara kualitatif. Terdapat tiga langkah yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk memahami data yang berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, dalam proses reduksi data ini, penulis berusaha untuk melakukan penyuntingan dan klasifikasi data sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam penulisan ini. Setelah dilakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Keragaan Sektor Perikanan di Indonesia

Hingga tahun 2010, terjadi penurunan jumlah nelayan dibandingkan dengan jumlah pembudidaya ikan. Pada tahun 2007, jumlah nelayan mencapai 2,7 juta orang, sedangkan pada tahun 2010, angka tersebut turun menjadi 2,6 juta orang. Sementara itu, jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2007 mencapai 2,3 juta orang dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 3,3 juta orang. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong peralihan dari kegiatan perikanan tangkap ke perikanan budidaya melalui sejumlah program, baik yang didukung oleh asing maupun dari APBN. Di beberapa daerah yang masih memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap karena sumber daya ikan masih berada di atas potensi lestari, jumlah nelayan cenderung meningkat. Namun, di beberapa daerah yang telah mengalami overfishing, banyak nelayan yang beralih profesi atau beralih ke usaha dalam perikanan budidaya.

Dengan luas lautan mencapai dua per tiga dari luas wilayah dan garis pantai mencapai 104 ribu km, Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Volume produksi perikanan pada tahun 2011 mencapai 12,385 juta ton, dengan produksi terbesar berasal dari perikanan laut dan budi daya laut. Fakta ini menunjukkan bahwa laut masih memiliki peran kunci dalam pengembangan sektor perikanan.

Ekspor utama komoditas perikanan meliputi udang, tuna, cakalang, tongkol, ikan lainnya, dan kepiting, dengan udang masih menjadi komoditas yang paling penting. Udang khususnya diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa, sementara tuna dan cakalang utamanya diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Secara khusus, persyaratan pasar di Uni Eropa sangat ketat, terutama terkait dengan larangan terhadap kadar kimia tertentu meskipun dalam jumlah yang masih dapat ditoleransi oleh tubuh manusia, serta penggunaan metode penangkapan yang aman. Udang berasal dari perikanan budidaya, sementara tuna, cakalang, dan tongkol berasal dari perikanan tangkap.

Sebagian besar impor komoditas perikanan terdiri dari tepung ikan dan ikan segar/ikan beku. Tepung ikan digunakan sebagai bahan baku pakan untuk ternak, ikan, udang, pupuk, dan juga untuk konsumsi manusia. Mayoritas impor tepung ikan berasal dari Peru, Chile, Denmark, dan Amerika Serikat. Indonesia mengalami kesulitan dalam mengembangkan produksi tepung ikan di dalam negeri karena terbatasnya pasokan bahan baku dan rendahnya kualitasnya. Impor tepung ikan telah terjadi sejak tahun 1995 dan terus meningkat baik dalam volume maupun nilai hingga saat ini. Sementara itu, ikan segar/beku yang diimpor berasal dari Cina dan bahkan Malaysia, meskipun panjang garis pantai Cina hanya 32 ribu kilometer. Volume dan nilai impor hasil perikanan terus meningkat secara signifikan.

2. Faktor-Faktor Dominan Pengembangan Perikanan

a. Aspek Lingkungan

Perikanan tangkap sangat bergantung pada potensi sumber daya ikan di berbagai wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti Selat Malaka, Samudera Indonesia-Pantai Barat Sumatera, Samudera Indonesia-Selatan Jawa, Laut China Selatan, Laut Jawa, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan Laut Seram, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Laut Arafura dan Laut Timor. Potensi sumber daya ikan yang tinggi terdapat di wilayah seperti Laut China Selatan, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Arafura dan Laut Timor, dan Laut Jawa. Beberapa wilayah pengelolaan perikanan yang telah mengalami eksploitasi lebih lanjut termasuk Selat Malaka, Laut Banda, dan Samudera Pasifik. Daerah-daerah ini memiliki populasi nelayan yang lebih besar dengan armada penangkapan yang masih tergolong sederhana.

Pemanfaatan sumber daya ikan dari kelompok yang memiliki estimasi potensi rendah harus dihentikan sementara sampai potensi kelompok sumber daya tersebut meningkat. Pemanfaatan kelompok udang sebaiknya dihindari untuk sementara waktu, sementara beberapa jenis ikan demersal, ikan pelagis kecil, tuna besar, dan cumi-cumi masih bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Perkembangan perikanan tangkap di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan kapal penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan. Sebagian besar nelayan di Indonesia menggunakan perahu motor tempel, yang mengakibatkan keterbatasan daya jelajah untuk menangkap ikan. Hanya ada sekitar 370 unit kapal motor dengan mesin di atas 200 Gross Ton (GT) yang memiliki fasilitas pengolahan yang terbatas.

Menurut Fauzi pada tahun 2007, keberagaman alat tangkap menyebabkan adanya nonkonveksitas, yang mengakibatkan solusi jumlah kapal pada saat dilakukan rasionalisasi berakhir dengan jumlah yang tidak terduga sebelumnya. Sumber daya perikanan merupakan contoh dari nonkonveksitas ini, di mana sumber nonkonveksitas terjadi karena dalam situasi ini biaya tetap diasumsikan independen terhadap total unit

upaya yang diperlukan dalam perikanan secara keseluruhan. Biaya ini hanya dapat dihindari jika perikanan ditutup atau dihentikan sama sekali. Selain itu, input yang digunakan oleh nelayan sebagian besar tidak dapat bergerak secara sempurna, sehingga ketika perikanan mengalami stagnasi, biaya untuk memulai kembali atau biaya re-entry diperlukan.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan serangkaian program untuk meningkatkan kapasitas nelayan dengan memberikan bantuan modal kerja berupa kapal dan alat penangkapan ikan berukuran di atas 30 GT di wilayah perairan Indonesia bagian barat. Namun, bantuan ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kegiatan penyuluhan yang menyertainya dan kesulitan dalam memperoleh modal tambahan, seperti bahan bakar dan fasilitas penyimpanan dingin. Nelayan juga mengalami kesulitan karena alat penangkapan ikan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, dan mereka tidak memiliki keterampilan untuk menggunakannya.

Pemanfaatan potensi budi daya di tingkat nasional harus disertai dengan evaluasi potensi di setiap wilayah provinsi, serta kabupaten/kota, sehingga data potensi harus diuraikan kembali dan disampaikan kepada pembudidaya ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya harus memastikan ketersediaan akses bagi pembudidaya ikan untuk mendapatkan bibit/benih dan fasilitas penyimpanan dingin, serta menyiapkan infrastruktur seperti pasokan listrik. Selain itu, rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota perlu ditetapkan. Di wilayah yang memiliki potensi pengembangan perikanan, pemerintah daerah harus menolak pembangunan industri yang berpotensi merusak ekosistem atau mengharuskan industri memiliki kemampuan untuk mencegah pembuangan limbah langsung ke perairan.

Menurut Fauzi dan Anna pada tahun 2005, sumber daya alam di wilayah pesisir telah mengalami tingkat deplesi dan degradasi yang cukup mengkhawatirkan. Deplesi merujuk pada penurunan stok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan laju yang lebih tinggi daripada yang seharusnya, atau eksploitasi yang melebihi tingkat yang seharusnya. Degradasi mengacu pada penurunan kualitas atau kuantitas sumber daya alam yang dapat diperbarui, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Untuk meningkatkan sumber daya tersebut, perlu diterapkan berbagai kebijakan, terutama terkait dengan kawasan konservasi yang berhubungan dengan masyarakat dan kualitas terumbu karang. Gossling, dalam penelitiannya pada tahun 1999, menyatakan bahwa hal ini merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup kawasan konservasi dan memerlukan strategi untuk mengatasi kerusakan ekosistem.

Hingga tahun 2011, Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,413 juta hektar, di antaranya termasuk kawasan konservasi perairan daerah dan taman nasional laut, yang merupakan kawasan konservasi laut terluas di Indonesia. Pada tahun tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan merencanakan penetapan Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10 kabupaten, dan 178 desa, dengan luas wilayah mencapai 3,5 juta hektar, sebagai bagian dari upaya mencapai target 20 juta hektar kawasan konservasi laut.

Penegakan hukum terkait penetapan luas kawasan konservasi laut harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Aparatur dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Air, dan TNI AL memiliki keterbatasan yang signifikan. Karena itu, dukungan dari masyarakat sangatlah penting.

Kawasan konservasi ditetapkan untuk mendukung pengembangan sumber daya perikanan dengan tujuan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang. Mengingat potensi sumber daya ikan yang terus menurun, diperlukan perluasan kawasan konservasi laut, terutama di wilayah yang mengalami penurunan potensi sumber daya ikan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan sumber daya lain.

Adanya kawasan konservasi laut memberikan dampak positif bagi sumber daya perikanan di wilayah pesisir dengan tujuan melindungi habitat dan populasi ikan agar

dapat berkembang dengan baik tanpa terganggu di kawasan yang dilindungi. Ikan dewasa dan ikan kecil yang berlimpah dapat bermigrasi keluar dari kawasan perlindungan, menciptakan efek penyebaran (spill-over effect), sehingga sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan Konservasi Laut memberikan tiga manfaat, yakni melindungi 28 ekosistem, mengelola sumber daya ikan secara efektif, dan mendukung keberadaan ekowisata.

Adanya kawasan konservasi penting untuk melakukan restorasi terhadap ekosistem wilayah pesisir yang telah mengalami kerusakan, terancam, atau memiliki potensi untuk mengganggu keseimbangan sumber daya perikanan. Secara keseluruhan, kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini dinilai kurang baik, dengan tingkat tutupan karang hidup di bawah 24 persen.

Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh aktivitas manusia di sekitar wilayah pesisir, yang dilakukan dalam rangka kegiatan perikanan atau aktivitas ekonomi lainnya. Penggunaan bahan peledak dan zat beracun dalam penangkapan ikan menyebabkan kematian terumbu karang. Selain itu, aktivitas ekonomi lainnya seperti pelayaran dan penambangan di wilayah pesisir, serta dampak pemanasan global, juga dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang.

Kondisi terumbu karang di bagian barat Indonesia menunjukkan status yang lebih buruk (0-24 persen tutupan karang hidup) jika dibandingkan dengan bagian tengah dan timur Indonesia. Untuk memperbaiki kondisi dan status terumbu karang di wilayah barat, tindakan-tindakan yang diperlukan termasuk (1) melakukan transplantasi terumbu karang, (2) memberikan bantuan kapal dan peralatan penangkapan ikan dengan kapasitas di atas 30 GT, serta menyediakan tenaga penyuluh dan fasilitas bagi nelayan untuk memperoleh input variabel; menetapkan kawasan konservasi dalam rencana zonasi wilayah pesisir, dan (3) melakukan transmigrasi bagi nelayan yang tinggal di wilayah yang potensi sumber daya ikannya telah terdegradasi. Upaya-upaya ini harus didukung dengan penegakan hukum yang ketat.

b. Aspek Sosial

Dari sudut pandang sosial, perkembangan perikanan berkaitan dengan usaha untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Indikator ini masih bergantung pada perubahan pendapatan nelayan. Ustriyana pada tahun 2007 mengusulkan bahwa indikator yang lebih akurat adalah nilai tukar nelayan, yang mempertimbangkan semua pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh keluarga nelayan.

Nilai tukar nelayan, yang merupakan indikator kesejahteraan mereka, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang juga memengaruhi tingkat kesejahteraan, termasuk variabel yang mempengaruhi peningkatan pendapatan nelayan dan variabel yang dapat mengurangi biaya. Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan dapat dilakukan melalui peningkatan teknologi penangkapan, penyediaan modal dengan tingkat bunga rendah, serta faktor-faktor yang dapat mengurangi biaya. Nilai tukar nelayan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2008 sebesar 101,14 menjadi 106,24 pada tahun 2011. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa nilai tukar nelayan terus meningkat.

Nelayan dan pembudidaya ikan merupakan pemain utama dalam sektor perikanan, namun sering diabaikan dalam manajemen usaha perikanan. Dalam konteks sosial, pengelolaan perikanan seringkali memunculkan konflik antara nelayan dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, harus segera ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (5). Rencana zonasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sehingga

batasan wilayah bagi nelayan dan pembudidaya ikan menjadi jelas. Beberapa daerah, seperti Sulawesi dengan 16 peraturan daerah, Kalimantan dengan 7 peraturan daerah, Sumatera dengan 10 peraturan daerah, dan Jawa dengan 2 peraturan daerah, telah memiliki regulasi terkait rencana zonasi wilayah pesisir.

Konflik di antara nelayan sering terjadi, terutama antara nelayan tradisional dan nelayan modern, antara nelayan lokal dan nelayan yang berasal dari luar daerah, serta di antara nelayan sendiri. Masalah utama terkait dengan sumber daya perikanan yang terbuka bagi siapa saja (open access) perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, penerapan izin harus diiringi dengan penegakan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mudzakir pada tahun 2011, pungutan dan penerapan izin menjadi hambatan dalam pengembangan sektor perikanan tangkap. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya sistem otonomi daerah yang mengakibatkan pungutan ganda, yaitu pungutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Pungutan-pungutan ini sering menjadi keluhan bagi para pengusaha perikanan laut. Sebagai contoh, untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan (IUP), pengusaha harus membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) yang dihitung berdasarkan GT (Gross Ton) kapal, dengan jumlah minimum per kapal sebesar Rp10 juta. Setelah membayar PPP, pengusaha baru bisa mendapatkan SIP (Surat Izin Perusahaan). Namun, untuk mendapatkan SIP, pengusaha harus membayar Pungutan Hasil Penangkapan (PHP), yang dihitung berdasarkan GT kapal dikalikan dengan produktivitas tangkapan dikalikan 2,5 persen, dan kemudian dikalikan dengan harga patokan jenis ikan. Selain itu, pengusaha juga harus mengurus berbagai surat lain dari instansi perhubungan laut, keamanan, dan instansi lainnya. Situasi ini menyebabkan biaya yang tinggi dalam perekonomian dan berdampak negatif terhadap daya saing dan produktivitas perikanan tangkap.

Konflik antara nelayan sering terjadi di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, antara nelayan purse seine lokal dan nelayan andon sejak tahun 1990-an, mencapai puncaknya pada tahun 2003-2004. Penyelesaian konflik tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan nelayan yang melibatkan penyuluh dan petugas teknis lapangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

c. Aspek Ekonomi

Pada tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,9 triliun. Di antara anggaran tersebut, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) premium mencapai 231 ribu kiloliter atau setara dengan 0,1 persen, dan subsidi untuk BBM solar mencapai 2,47 ribu kiloliter atau setara dengan 1,7 persen, dengan total subsidi mencapai Rp7,89 triliun. Kebutuhan bahan bakar bagi nelayan pada tahun tersebut mencapai 2,5 juta kiloliter, dimana nelayan perikanan tangkap membutuhkan sekitar 1,95 juta kiloliter dan pembudidaya ikan memerlukan sekitar 561 ribu kiloliter. Meskipun subsidi ini digunakan untuk bahan bakar, namun belum ada alokasi khusus subsidi yang mendukung pengembangan sektor perikanan budi daya. Hal ini mencakup subsidi untuk input dan output, pengembangan sistem informasi dan data, serta teknologi. Subsidi untuk input meliputi bibit/benih, cold storage, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara subsidi untuk output bertujuan menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pengalokasian dana untuk subsidi perlu dilakukan secara hati-hati karena kebijakan subsidi dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan. Perubahan dalam armada penangkapan ikan oleh nelayan lokal telah menyebabkan distorsi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di beberapa perairan. Contohnya, di Newfoundland, subsidi yang diberikan kepada armada penangkapan ikan dari Kanada, Spanyol, Portugal, Uni Soviet, dan Polandia telah menyebabkan penangkapan berlebihan di perairan tersebut. Ketika subsidi dihentikan di Uni Soviet setelah

keruntuhan negara tersebut, terjadi pemulihan sebagian stok ikan di perairan Rusia yang sebelumnya dieksploitasi oleh Uni Soviet. Selain itu, Cina dan Thailand juga memberikan subsidi untuk industri perikanan mereka, yang mendorong armada perikanan dari negara-negara tersebut untuk menangkap ikan di perairan di luar yurisdiksi mereka sendiri.

d. Tindak Lanjut

Pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan, termasuk baik dalam perikanan tangkap maupun budi daya, memperhatikan tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

1) Aspek Lingkungan dilakukan melalui:

a) Pengembangan kawasan konservasi laut bertujuan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang menjadi habitat dan tempat berkembang biak bagi ikan. Ini dilakukan khususnya di wilayah seperti WPP 571 (Selat Malaka), WPP 714 (Laut Banda), dan WPP 717 (Samudera Pasifik), di mana potensi sumber daya ikan telah menurun. Oleh karena itu, kawasan konservasi laut didirikan di perairan-pairan tersebut. Namun, hal yang paling penting dalam pengembangan kawasan konservasi laut adalah penegakan hukum yang tegas.

b) Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting mengingat luasnya perairan Indonesia yang mencapai 3.544.743,90 km², termasuk sungai, danau, dan perairan umum. Berdasarkan data FAO tahun 2008 yang dikutip oleh Dahuri tahun 2012, kerugian negara akibat illegal, unreported and unregulated fishing mencapai 1 juta ton per tahun atau Rp30 triliun pertahun yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1980-an. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga perairan Indonesia dari IUU fishing harus ditingkatkan. IUU fishing termasuk di dalamnya kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang atau mengamankan para pihak yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem yang menunjang pengembangan perikanan. Law enforcement di Laut Arafuru dan perairan sekitar Papua, perairan Pantura dan Selat Malaka, relatif tidak berfungsi dan ikan yang terdapat dalam perairan selalu bermigrasi, sehingga naluri nelayan untuk menangkap lebih tidak dapat dihindari. Sebuah studi di Kota Batam yang dilakukan oleh Yulisti et al. tahun 2011 mengidentifikasi beberapa faktor domestik yang menyebabkan illegal fishing, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, rendahnya kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, permasalahan ekonomi dan pemasaran seperti disparitas harga dan kurangnya modal usaha, belum efektifnya pengawasan baik dari segi waktu dan anggaran maupun jumlah sumber daya, sarana, dan prasarana pengawasan, serta permasalahan kelembagaan seperti belum adanya kesepakatan batas negara dan kelembagaan terkait dengan tempat pendaratan ikan.

2) Aspek Sosial

a) Penetapan rencana zonasi wilayah pesisir provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian terintegrasi dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Rencana zonasi ini harus berkesesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025. Penetapan zonasi wilayah pesisir dilakukan melalui peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertujuan untuk memberikan kepastian kepada nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha mereka. Daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan perikanan dalam dokumen Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia harus memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan industri perikanan dengan menetapkan kawasan pemukiman serta lokasi penangkapan atau pembudidayaan ikan. Penetapan zonasi yang jelas, didukung dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal antara nelayan.

- b) Transmigrasi nelayan dan pembudidaya ikan dari daerah dengan penurunan potensi sumber daya ikan ke daerah yang masih memiliki potensi eksploitasi menjadi suatu solusi yang penting. Di wilayah seperti WPP 571 (Selat Malaka), WPP 714 (Laut Banda), dan WPP 717 (Samudera Pasifik), di mana potensi sumber daya ikan telah menurun, langkah yang harus diambil adalah mengarahkan nelayan untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah yang masih memiliki potensi tinggi, seperti WPP 711 (Laut China Selatan), WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat Makassar dan Laut Flores), dan WPP 718 (Laut Arafura dan Laut Timor). Contohnya, dalam perikanan udang di Laut Arafuru dan sekitar Papua, dalam penelitian Sukirdjo tahun 2003, jumlah kapal yang seharusnya diizinkan beroperasi antara 183 hingga 280 unit, namun pada tahun 2001, jumlah kapal yang beroperasi secara resmi mencapai 513 unit. Upaya yang bisa dilakukan meliputi transmigrasi nelayan dan pembudidaya ikan ke wilayah yang masih memiliki potensi sumber daya ikan tinggi, atau memberikan bantuan atau insentif agar mereka dapat mengeksploitasi wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, bantuan atau insentif tersebut dapat mencakup kemudahan akses nelayan untuk memperoleh kapal dan peralatan penangkapan ikan yang sesuai, dengan kapasitas di atas 30 GT.
- 3) Aspek Ekonomi
- a) Peningkatan anggaran untuk sektor perikanan melibatkan alokasi dana untuk belanja rutin dan pembangunan. Subsidi yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan termasuk dalam kategori belanja pembangunan. Saat ini, subsidi yang diberikan hanya terbatas pada bantuan untuk bahan bakar, yang sering kali tidak tepat sasaran karena hanya menguntungkan nelayan dengan skala usaha menengah dan besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam mekanisme pemberian subsidi agar sesuai dengan kebutuhan. Subsidi dapat diberikan melalui kelompok nelayan mikro dan kecil, dengan pendataan yang akurat sebelum alokasi dana. Peran penyuluh sangat penting dalam memberikan pendampingan untuk memastikan bantuan kredit kapal dan peralatan penangkapan ikan yang memadai dapat digunakan dengan efektif di perairan territorial dan zona ekonomi eksklusif. Kehadiran penyuluh harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan yang mengatur lembaga penyuluhan perikanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan.
 - b) Pemerintah telah meluncurkan Program Sistem Logistik Ikan Nasional untuk mengintegrasikan pasokan ikan dari nelayan dan pembudidaya ikan dengan kebutuhan industri perikanan di tingkat nasional. Oleh karena itu, infrastruktur pengolahan perikanan harus disiapkan dengan baik sebelum pasokan ikan diserap oleh industri. Ini mencakup penyediaan fasilitas seperti cold storage, pelabuhan, pasokan listrik, dan akses jalan yang memadai.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah pendekatan yang mengontrol upaya penangkapan berdasarkan hasil tangkapan maksimum untuk memastikan kelestarian

sumber daya ikan dan ekosistemnya. Tujuan utama dari konsep pengelolaan perikanan adalah pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dulu, kita sering memanfaatkan berbagai sumber daya perikanan untuk kehidupan sehari-hari, seperti berbisnis dalam perdagangan sumber daya laut dan meningkatkan nilai tambah melalui berbagai jenis pengolahan. Namun, jika melihat kondisi dan situasi saat ini, apakah sumber daya yang ada di daerah kita akan tetap seperti dulu? Tentu saja tidak.

Kita sering mendengar banyak kasus tentang penurunan populasi ikan dan biota laut lainnya serta kerusakan ekosistem. Hal ini biasanya disebabkan oleh penangkapan berlebihan, penggunaan alat tangkap ilegal, dan pencemaran laut akibat sampah plastik yang masih menjadi masalah saat ini. Siklus ini akan terus berlanjut jika kita belum memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungan dan belum melakukan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang merusak lingkungan sekitar, yang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi generasi mendatang.

Apakah ada langkah-langkah untuk memulihkan populasi perikanan dan ekosistem laut? Jangan khawatir, terdapat beberapa rencana yang baik untuk memulai dan memulihkan sistem pengelolaan. Berdasarkan kebijakan dari Kementerian PPN/Bappenas, strategi yang akan diterapkan untuk menciptakan pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Produksi Ikan
 - a) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.
 - b) Pengelolaan usaha perikanan dengan prinsip keberlanjutan.
- 2) Peningkatan Konsumsi Ikan
 - a) Kampanye gemar makan ikan
 - b) Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pemasaran guna meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.
- 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah
 - a) Peningkatan mutu produk perikanan.
 - b) Pengembangan sistem logistik nasional.
 - c) Peningkatan *Utility* UPI dan kepastian pasokan bahan baku.
 - d) Pengendalian impor.
- 4) Pengembangan ekonomi kelautan (bagian KKP).
 - a) Pendayagunaan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi untuk meningkatkan keekonomian sd. Kelautan.
 - b) Peningkatan kualitas garam, pengembangan bioteknologi, pengelolaan perikanan.
- 5) Pengelolaan aset dan pertahanan keamanan laut (bagian KKP)
 - a) Pengelolaan pulau-pulau kecil.
 - b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan wilayah laut.
 - c) Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan wilayah laut dan pengamanan wilayah dari pemanfaatan SDK yang merusak
- 6) Tata Kelola.
 - a) Pengaturan tata ruang laut
 - b) Penyelesaian rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil
 - c) Indonesian ocean policy
- 7) Pengurangan dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
 - a) Peningkatan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana laut dan penanganan pencemaran laut
 - b) Penanaman mangrove di kawasan pesisir yang rusak
- 8) SDM dan IPTEK yang mendukung

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pengetahuan, terutama terkait dengan peningkatan wawasan bahari dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan berorientasi pada permintaan
 - b) Meningkatkan kemampuan iptek terkait dengan pengelolaan SDK
- 9) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan atau masyarakat pesisir.
- a) Peningkatan program kehidupan nelayan berbasis usaha perikanan.
 - b) Program perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk asuransi, sertifikasi dan sebagainya.
 - c) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Itulah beberapa upaya dari Kementerian PPN/Bappenas dalam strategi pengelolaan. Misalnya, kita sebagai masyarakat juga bisa berperan dalam menjaga lingkungan laut dan pesisir dengan menanam bibit mangrove. Ini akan membantu melestarikan ekosistem perikanan, sehingga habitat tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui sumber daya perikanan yang berasal dari ekosistem yang sehat.

2. Ekonomi Perikanan Berkelanjutan

Ikan adalah sumber daya alam yang dapat pulih dan dimiliki bersama, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik untuk mempertahankan dan mengembangkan populasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan informasi tentang perikanan untuk mempelajari perilaku kehidupan dan karakteristik dari populasi yang membentuk komunitas dalam sumber daya alam tersebut.

Dalam bukunya tahun 2010, Fauzi mengungkapkan bahwa sektor perikanan terdiri dari tiga komponen utama: basis sumber daya, industri perikanan primer, dan industri pengolahan serta perdagangan. Basis sumber daya mencakup kegiatan perikanan berdasarkan jenis ikan, baik finfish (ikan) maupun non-finish (non-ikan) seperti crustacea (udang) dan kerang (cephalopods). Komponen kedua adalah industri primer, yang melibatkan pemanenan langsung sumber daya ikan. Industri ini dapat dikategorikan berdasarkan skala atau tipe, termasuk perikanan industri atau komersial yang menggunakan alat tangkap modern, memiliki jarak tempuh lebih jauh, dan skala pemasaran yang lebih luas. Komponen ketiga adalah pengolahan dan perdagangan, yang timbul karena tiga alasan utama: kebutuhan menyimpan hasil tangkap dalam waktu lama, transportasi hasil tangkap dari lokasi penangkapan ke pasar yang jauh, dan tujuan ekspor. Selain itu, sektor perikanan juga memerlukan dukungan dari galangan kapal dan peralatan perikanan sebagai komponen pendukung.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan perikanan, faktor utama yang menentukan adalah "pengelolaan yang bertanggung jawab," yang mengacu pada pengelolaan yang bijaksana dalam menjaga persediaan sumber daya ikan agar dapat dinikmati secara optimal oleh generasi saat ini dan masa mendatang. Salah satu langkah kunci dalam mempertahankan dan mengembangkan populasi ikan adalah dengan menerapkan pengelolaan yang efisien berdasarkan sistem manajemen yang kuat. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan prinsip pengelolaan perikanan yang dinamis, yang dapat dilakukan dengan cara seperti menetapkan larangan penangkapan ikan pada musim tertentu, menutup daerah penangkapan tertentu, dan mengatur jumlah tangkapan ikan. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, evaluasi teknologi penangkapan ikan yang sesuai, serta campur tangan pemerintah dalam regulasi izin, pajak, dan pungutan untuk mendorong investasi.

Tujuan pembangunan perikanan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di dalam setiap kategori tersebut, terdapat subkategori seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian sumber daya ikan. Memenuhi semua aspek pengelolaan, seperti

keberlanjutan, efisiensi, dan kesetaraan, untuk setiap tujuan tersebut merupakan tantangan yang sulit.

3. Kebijakan Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, baik secara penuh maupun parsial, memiliki dasar atau prinsip yang serupa dengan keterlibatan pemerintah dalam sektor ekonomi lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini terwujud melalui empat fungsi utama, yakni fungsi alokasi, distribusi, keadilan, dan stabilisasi. Fungsi alokasi dilakukan dengan mengatur distribusi sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi distribusi dipraktikkan untuk memastikan adanya keadilan dan proporsi yang sesuai dengan kontribusi dan beban yang ditanggung oleh masyarakat. Fungsi keadilan juga diterapkan oleh pemerintah dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang mungkin terpinggirkan atau lebih rentan dalam situasi yang ada. Sementara fungsi stabilisasi dilakukan untuk mencegah instabilitas yang bisa merusak tatanan sosial dan ekonomi akibat pemanfaatan sumber daya ikan.

Satria menyarankan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2013, terutama fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan melalui program subsidi yang responsif dan efisien. Upaya modernisasi perikanan, termasuk bantuan seribu kapal, dapat lebih berhasil dengan memperkuat kemampuan adaptasi nelayan terhadap peralatan baru yang diperoleh.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Jumlah nelayan yang aktif di sektor perikanan tangkap semakin menurun jika dibandingkan dengan jumlah pembudidaya ikan. Di wilayah-wilayah tertentu yang masih memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap karena sumber daya ikan masih berada di atas ambang batas potensi lestari, jumlah nelayan cenderung meningkat. Namun, di daerah-daerah yang telah mengalami kelebihan penangkapan ikan (*overfishing*), banyak nelayan yang beralih profesi atau terlibat dalam kegiatan pembudidayaan ikan.

Perikanan tangkap sangat bergantung pada potensi sumber daya ikan di wilayah manajemen perikanan. Kelompok sumber daya ikan yang memiliki estimasi potensi rendah harus dihentikan pemanfaatannya sementara sampai potensi kelompok tersebut meningkat. Eksploitasi kelompok udang sebaiknya dihindari untuk sementara waktu, sementara beberapa jenis kelompok ikan demersal, pelagis kecil, tuna besar, dan cumi-cumi masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengembangan perikanan tangkap sangat bergantung pada jenis kapal penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan di Indonesia. Sebagian besar nelayan Indonesia menggunakan perahu motor tempel, yang memiliki keterbatasan dalam daya jelajah untuk menangkap ikan. Kapal motor dengan mesin di atas 200 GT hanya sedikit, sekitar 370 unit, dan masih terbatas dalam sarana pengolahan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah meluncurkan beberapa program untuk meningkatkan kapasitas nelayan dengan memberikan bantuan modal kerja berupa kapal dan alat penangkapan ikan di atas 30 GT di wilayah perairan Indonesia bagian barat. Namun, bantuan tersebut menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya kegiatan penyuluhan dan kesulitan dalam memperoleh modal, seperti bahan bakar dan cold storage.

Potensi terbesar dalam pengembangan perikanan budi daya terletak pada pengembangan di laut, tambak, dan sawah. Potensi pengembangan perikanan budi daya lebih besar daripada pengembangan dalam perikanan tangkap. Pemanfaatan potensi budi daya secara nasional harus diimbangi dengan potensi di setiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga data potensi harus dipilah kembali dan

disampaikan kepada pembudidaya ikan. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu memastikan ketersediaan bibit/benih dan cold storage serta mempersiapkan infrastruktur seperti sumber listrik. Selain itu, rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota harus ditetapkan. Daerah yang memiliki potensi pengembangan perikanan harus menitikberatkan pada pembangunan industri yang tidak merusak keseimbangan ekosistem atau mewajibkan industri untuk memiliki sistem yang dapat mencegah pembuangan limbah langsung ke perairan.

Kawasan konservasi telah ditetapkan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan sumber daya perikanan dengan tujuan menjaga keberlangsungan ekosistem hutan mangrove dan terumbu karang. Mengingat penurunan potensi sumber daya ikan, perlunya perluasan kawasan konservasi laut, terutama di daerah yang mengalami penurunan potensi sumber daya ikan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan sumber daya lain. Hingga tahun 2011, Indonesia telah menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,413 juta hektar, dengan kawasan perairan daerah dan taman nasional laut menjadi yang terluas. Penegakan hukum terhadap luas kawasan konservasi laut harus melibatkan semua lapisan masyarakat, mengingat keterbatasan aparat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Air, dan TNI AL. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat sangatlah penting. Kehadiran kawasan konservasi diperlukan untuk merestorasi ekosistem wilayah pesisir yang telah rusak, terancam rusak, atau berpotensi mengganggu keseimbangan sumber daya perikanan.

Para nelayan dan pembudidaya ikan berperan penting dalam mendorong perkembangan sektor perikanan namun seringkali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam pengelolaan usaha perikanan. Di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya perikanan seperti Provinsi Sulawesi Utara, nelayan dan pembudidaya ikan seringkali terpinggirkan akibat adanya modernisasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu segera dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) yang menuntut penetapan dalam bentuk peraturan daerah. Rencana zonasi ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti di Sulawesi dengan 16 peraturan daerah, Kalimantan dengan 7 peraturan daerah, Sumatera dengan 10 peraturan daerah, dan Jawa dengan 2 peraturan daerah telah memiliki peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir.

Pada tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,9 triliun. Dari anggaran tersebut, subsidi untuk premium mencapai 231 ribu kilo liter atau setara dengan 0,1 persen dari total anggaran, sementara subsidi untuk solar mencapai 2,47 ribu kilo liter atau 1,7 persen, dengan total nilai mencapai Rp7,89 triliun. Subsidi ini masih digunakan untuk membiayai bahan bakar, namun belum termasuk dalam alokasi subsidi yang bertujuan untuk pengembangan sektor perikanan budi daya. Pengembangan ini mencakup subsidi input dan output, pengembangan sistem informasi dan data, serta penerapan teknologi. Subsidi input meliputi bibit/benih, cold storage, dan fasilitas pendukung lainnya, sementara subsidi output mencakup upaya untuk menjaga stabilitas harga agar tidak merugikan nelayan dan pembudidaya ikan.

B. Saran

Kawasan konservasi laut dibuat dengan tujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove yang berperan penting sebagai habitat reproduksi dan perkembangan ikan. Pengembangan kawasan konservasi laut dilakukan terutama di daerah yang mengalami penurunan potensi sumber daya ikan,

seperti di WPP 571 (Selat Malaka), WPP 714 (Laut Banda), dan WPP 717 (Samudera Pasifik), dengan maksud untuk melindungi sumber daya ikan di wilayah tersebut. Namun, aspek yang paling penting dari pengembangan kawasan konservasi laut adalah penegakan hukum yang kuat untuk memastikan keberhasilannya.

Ketersediaan personel dan perlengkapan pendukung yang ada tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Indonesia yang meliputi 3.544.743,90 km², termasuk sungai, danau, dan perairan umum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk membantu menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem di wilayah pesisir.

Rencana zonasi wilayah pesisir di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus diselaraskan dengan rencana tata ruang wilayah setempat serta diintegrasikan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025. Penetapan rencana zonasi ini dilakukan melalui peraturan daerah sehingga memberikan kepastian kepada nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha mereka. Daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan perikanan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia harus memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan industri perikanan dengan menetapkan kawasan pemukiman serta area penangkapan atau pembudidayaan ikan.

Pemindahan nelayan dan pembudidaya ikan dari daerah dengan penurunan potensi sumber daya ikan ke wilayah yang memungkinkan untuk eksploitasi sumber daya ikan menjadi solusi. Di daerah yang potensi sumber daya ikannya sudah menurun, seperti WPP 571 (Selat Malaka), WPP 714 (Laut Banda), dan WPP 717 (Samudera Pasifik), langkah yang diambil adalah memastikan bahwa nelayan dapat mengejar potensi tangkapan di WPP 711 (Laut China Selatan), WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat Makassar dan Laut Flores), dan WPP 718 (Laut Arafura dan Laut Timor). Untuk mencapai hal ini, ada dua strategi yang dapat ditempuh, yakni transmigrasi nelayan dan pembudidaya ikan ke wilayah dengan potensi sumber daya ikan yang masih tinggi, atau memberikan bantuan dan stimulan kepada nelayan dan pembudidaya ikan agar dapat melakukan eksploitasi di wilayah yang masih memiliki potensi tinggi. Bantuan atau stimulan ini bisa berupa kemudahan dalam memperoleh kapal dan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan kapasitas di atas 30 GT.

Perlu meningkatkan alokasi dana untuk sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam hal peningkatan proporsi belanja pembangunan. Besaran subsidi yang diberikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan termasuk dalam kategori belanja pembangunan. Saat ini, subsidi yang diberikan hanya terbatas pada subsidi bahan bakar, yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan karena hanya menguntungkan nelayan dengan skala usaha menengah dan besar. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam mekanisme pemberian subsidi agar dapat menjangkau sasaran yang tepat. Subsidi bisa diberikan secara berkelompok melalui asosiasi atau kelompok nelayan mikro dan kecil.

Pemerintah telah menginisiasi program Sistem Logistik Ikan Nasional untuk mengintegrasikan pasokan ikan dari nelayan dan pembudidaya ikan dengan kebutuhan industri perikanan nasional. Sebagai hasilnya, perlu persiapan yang matang dalam sistem pengolahan perikanan sebelum pasokan ikan dapat digunakan oleh industri. Kebutuhan pengolahan, seperti cold storage, fasilitas pelabuhan, pasokan listrik, dan infrastruktur jalan, harus dipenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/3015/BAB%20I.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- <https://www.brilio.net/creator/9-strategi-untuk-menciptakan-pengelolaan-perikanan-berkelanjutan-637f3d.html>